

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). In *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Pusat Penelitian dan Penerbitan LPMM UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
<http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abner, K., & Adytama, M. L. (2024). Tata Letak Fasilitas Area Produksi Startup Ceripik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(01), 57–65.
- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta.
- Andini, D., Widodo, D., & Radjikan. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 173–181.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Anisa, P. N., & Ramli, T. A. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>
- Anwar, H., Muhaimin, A., & Casilam. (2023). Pengaruh Komunikasi Dan Koordinasi Terhadap Kinerja Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 3(1).
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik Teori Dan Praktik* (Vol. 19, Issue 5). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ariyanti, N. L. (2024). Strategi Komunikasi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Ilegal Di Mataram Studi Kasus Pada Direktorat Resers Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 4376–4380.
- Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI. (2023). *Cara Praktis Menyusun Denah Bangunan Industri Kosmetik*.
- Badan POM. (2023). *BPOM Temukan Lebih Dari 2 Juta Pieces Produk Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya*.
<https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-pieces-produk-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya>
- Badan POM. (2024). *Waspada Kosmetik Ilegal: BPOM Temukan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp 8,91 Miliar di Akhir 2024*.

<https://www.pom.go.id/berita/waspada-kosmetik-ilegal-bpom-temukan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp8-91-miliar-di-akhir-2024>

BBPOM Surabaya. (2023). *Bimtek CPKB - Jatim Glowing*. <https://www.youtube.com/live/WxjwvbobmFk?si=Mj0Ond49ofe6ANOW>

BBPOM Surabaya. (2024a). *Jatim Glowing mengawal Pelaku Usaha memperoleh Notifikasi Kosmetik*. <https://surabaya.pom.go.id/berita/jatim-glowing-mengawal-pelaku-usaha-memperoleh-notifikasi-kosmetik>

BBPOM Surabaya. (2024b). *Tingkatkan Daya Saing, BBPOM di Surabaya bimbing UMKM pahami regulasi pembuatan kosmetik melalui Jatim Glowing*. <https://surabaya.pom.go.id/berita/tingkatkan-daya-saing-bbpom-di-surabaya-bimbing-umkm-pahami-regulasi-pembuatan-kosmetik-melalui-jatim-glowing>

BPOM. (2022). *Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Kosmetika pada Petugas UPT Badan POM Tahun 2022*. https://www.youtube.com/live/7GfR_AhHLYM?si=m9MyNYPVklDrmLTW

BPOM. (2023). *Monitoring dan Evaluasi Fasilitator Pendampingan UMKM Kosmetik di UPT BPOM Seluruh Indonesia Tahun 2023*. <https://www.pom.go.id/berita/Monitoring-Dan-Evaluasi-Fasilitator-Pendampingan-Umkm-Kosmetik-Di-Upt-Bpom-Seluruh-Indonesia-Pada-Triwulan-Ii-Tahun-2023>

BPOM. (2024). *Bimbingan Teknis Penyuluh dan Kader Obat Bahan Alam, Suplemen, Kesehatan, Dan Kosmetik*. <https://www.youtube.com/live/ot7iJZrYIwk?si=2d6bRFDUw7viPCiG>

BPOM. (2025). *Bimbingan Teknis Fasilitator UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik*. <https://pmpuotsskkos.pom.go.id/berita/bpom-tingkatkan-kompetensi-fasilitator-melalui-bimbingan-teknis-fasilitator-umkm-obat-bahan-alam-dan-kosmetik-2>

Darman, Mooduto, W. I. S., Rachman, A., & Dunggio, T. (2024). Pemberdayaan UMKM “Motivasi Dan Inovasi Dalam Strategi Pemasaran.” *Communnity Development Journal*, 5(5), 8674–8679.

Dewi, D. S. K. (2022). *BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Samudra Biru.

Diantika, F., Santosa, P., & Indah, D. (2024). Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung). *INNOVATE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 3692–3703.

Fadlurahman, F. G., & Fitria, I. J. (2024). Analisis Keterbatasan Sumber Daya

- Manusia Terhadap Kinerja Pada RUMAH BUMN Bandung. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 28(7), 208–216.
- Fahreza, A., Sugandi, & Wibowo, S. E. (2018). Analisa Penerapan Komunikasi Efektif Untuk Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(3), 149–158.
- Febriani, E., Razak, A. R., & Malik, I. (2022). Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(2), 473–485.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Filan, C. M., Fernandes, J. F., Siswanto, C. A., & Indradewi, A. A. (2024). Efektivitas Undang-Undang Pelindungan Konsumen Dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Ilegal di Surabaya. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 333–338.
- Gelong, H. R., Hamid, L. O. A., & Prahaditama, T. A. (2024). Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 5(1), 49–58.
- Geni, F. P. L., & Budiyaniti, E. (2025). Potensi pasar industri kecantikan di indonesia. *Pusaka DPR RI*.
[https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2025-2444.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2025-2444.pdf)
- Hanafi, Saptawan, A., & Nengyanti. (2023). Kinerja Implementasi Kebijakan Pendataan Lengkap Koperasi , Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Tahun 2022 di Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintah Dan Politik*, 8(4), 325–337.
- Harefa, S. Y., Lahagu, P., Mendrofa, S. A., & Zebua, S. (2024). Analisis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Program Pelatihan dan Pengembangan Berkelanjutan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli dengan perubahan teknologi , metodologi kerja , dan dinamika industri. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 3, 299–314.
- Hartawan, D. F. M., Monica, D. R., & Tamza, F. B. (2024). Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 8. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1847>
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Tanah Air Beta.
- Indonesia.go.id. (2024). Kinclong Industri Kosmetik Tanah Air. *Portal Informasi*.
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7984/kinclong-industri-kosmetik-tanah-air?lang=1>

- Junaidi, G., Sidu, D., & Arimbawa, P. (2022). Peran Fasillitator Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Peserta Program Readsdi Di Desa Trimulya Kecamatan Onembute Kabupaten Kolaka Timur. *JIIKPP (Jurnal Ilmiah Inovasi Dan Komunikasi Pembangunan Pertanian)*, 1(4), 69–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56189/jiikpp.v1i4.31519>
- Kartika, R. S., & Simorangkir, G. (2019). Efektivitas Bimtek Fasilitator Dalam Pelaksanaan Inovasi Daerah. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 119–131. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.119-131>
- Kusisai, A. L. (2017). Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pontianak. *Ilmu Administrasi Negara*, 6.
- Laporan Tahunan 2022 BBPOM Surabaya (2022). [https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan Tahunan 2022 BBPOM Surabaya](https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%202022%20BBPOM%20Surabaya)
- Laporan Tahunan 2024 Direktorat Pengawasan Kosmetik (2024). [https://waskos.pom.go.id/storage/informasipublik/Laporan Tahun Ditwaskos Tahun 2024.pdf](https://waskos.pom.go.id/storage/informasipublik/Laporan%20Tahun%202024.pdf)
- Mesiono, & Pohan, R. (2021). Komunikasi Organisasi Pendidikan. *Journal Educational Research and Social Studies*, 2(1), 1–12.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Muryani, A., & Prabawati, I. (2025). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kemitraan UMKM Di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Magetan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 7(1).
- Namira, B., & Permatasari, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Program Pembiayaan UMKM di Kota Palembang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 7(1), 9–15. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2224>
- Octavian, H. S., Sastra, H., & Nurjanah, Y. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Meningkatkan Kualitas SDM Dan Pendapatan UMKM Kota Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 4(1), 59–66. <https://doi.org/10.37641/jadkes.v4i1.1811>
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik (2013).
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (2022).

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (2021).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika (2010).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (2017).

Pitriyani, & Halim, A. (2020). Pengaruh Pengalaman Kerja, Latar Belakang Pendidikan Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pegadaian Persero Cabang Rantauprapat. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 1(1), 60–68.

Putri, A. F., & Azizah, N. (2024). Implementasi Program Pedampingan Oleh Fasilitator Dalam Meningkatkan Kapasitas Kewirsausahaan Dan Profitabilitas UMKM Nasabah BTPN Syariah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 204–209.

Rachman, A., Widyaningrum, D., & Rizqi, A. W. (2023). Perancangan Tata Letak Fasilitas Untuk Meminimalkan Jarak Material Handling Pada Pabrik Pupuk Organik PT. Petrokopindo Cipta Selaras Dengan Metode ARC Dan ARDNo Title. *Jurnal Teknik Industri*, 9(1). <https://doi.org/10.24014/jti.v9i1.22853>

Radjak, F., Sendouw, R. H. E., Siwij, D. S. R., & Xi, R. (2025). Pengaruh Koordinasi Dan Pembagian Beban Kerja Terhadap Kinerja Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 2508–2517.

Rohman, M. A. S., Faizal, & Jauhari, T. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Program Keluarga Harapan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2066–2079.

Sonda, J., Kiyai, B., & Kolondam, H. (2018). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, IV(062).

Srijani, N., & Ardiyani, M. (2025). Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pelaku UMKM untuk Memperkuat Daya Saing pada Era Lingkungan Bisnis yang Dinamis Universitas PGRI Madiun , Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(20), 2032–2037.

Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing*. Brilliant.

Sucahyo, I., Mubarak, H., & Adawiyah, R. (2022). Implementasi Program Online

Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Probolinggo Di Era New Normal. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial (Publicio)*, 4(2).

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suhendri, I., Koeswara, H., & Putera, R. E. (2024). Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Padang. *Menara Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(2), 74–91. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.5591>

Sumarsono, C. W., Muchsin, S., & Sunariyanto. (2022). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 228–249.

Susanti, S., Setiawan, A., Pricilia, Y., Sitompul, L., Khairani, D., & Ayuning, V. (2024). Tantangan Kurangnya Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Pelatihan Di SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Kota Medan. *DIVERSIFICATION: Journal of Economics and Management Studies*, 1(2), 60–67.

Tambunan, T. S. (2023). Analisis Peran Pemerintah Daerah Mendukung UMKM Naik Kelas. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 77–88.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (2008).

Widyastuti, A. T., Rahmawati, R., & Rusliandy. (2022). Implementasi Kebijakan Izin Prosedur Baru BPOM Tentang Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 53–62.

Yahya, A., & Dirgantara, P. (2022). Efektivitas Penggunaan WhatsApp Sebagai Media Komunikasi Organisasi Program PTSL Di Lingkungan Pegawai Dinas ATR/BPN Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau*, 10(1), 409–420.

Yuliana, R., & Rahadi, D. R. (2021). Komunikasi Interpersonal Dalam Meningkatkan Motivasi Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Magisma*, IX(1), 27–35.